

#### BUPATI TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANAN SELATAN

#### PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 79 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

#### BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang salah satu unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut adalah penilaian resiko;
  - b. bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam melakukan perencanaan pengawasan berbasis risiko atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan memerlukan pedoman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1790);
- 13. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Pembentukan 2016 tentang dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 2016 Bumbu Nomor 19 Tahun Tanah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
- 15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan

- perwakilan rakyat daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanangan Daerah.
- 6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
- 7. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman PPBR dimaksudkan sebagai dasar acuan PPBR bagi APIP Daerah.
- (2) Pedoman PPBR bertujuan untuk memberikan panduan bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

#### Pasal 3

Sistematika pedoman PPBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Umum Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. BAB III Penilaian Kematangan Manajemen Risiko; dan
- d. BAB IV Perencanaan Pengawasan.

#### Pasal 4

Pedoman PPBR bagi APIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

> Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

#### PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) paragraf 3010, mensyaratkan Pimpinan APIP untuk menyusun rencana strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. Hal tersebut dimaksudkan agar APIP mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi (AAIPI, 2013). Untuk memenuhi persyaratan tersebut, APIP Daerah memerlukan sebuah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Pendekatan tersebut dikenal dengan istilah Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Untuk mencapai Level 3, Internal Audit Capability Model (IA-CM) mensyaratkan agar APIP Daerah mampu melakukan pengawasan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Hal ini dapat dilakukan apabila APIP Daerah memiliki perencanaan pengawasan yang berbasis pada risiko auditan. PPBR mengintegrasikan proses perencanaan pengawasan intern ke dalam proses manajemen risiko yang dibangun organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dapat selaras dengan harapan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

#### B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang lebih rinci bagi APIP Daerah dalam menyusun rencana pengawasan baik pengawasan strategis maupun pengawasan tahunan.

Sedangkan manfaat yang diharapkan adalah:

- 1. APIP mengintegrasikan rencana pengawasannya dengan implementasi manajemen risiko;
- 2. APIP melaksanakan pengawasan intern dengan lebih efektif dan efisien meskipun dukungan sumber daya APIP terbatas; dan
- 3. APIP mampu mencapai *output* pengawasan intern yang berkualitas dan memberi nilai tambah *(value added)* bagi para pemangku kepentingan *(stakeholder)* dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

#### C. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko ini adalah sebagai berikut :

#### • BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, tujuan dan manfaat, serta sistematika pembahasan.

# • BAB II GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO (PPBR)

Bab ini membahas Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP serta Langkah-langkah PPBR.

#### • BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

Bab ini membahas Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah, Penyusunan/pemutakhiran *Audit Universe*/Peta Auditan, Menilai kematangan MR, Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

#### • BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

Bab ini membahas Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan, Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun dan Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

### BAB II GAMBARAN UMUM PPBR

A. Keterkaitan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dalam *Grand Design* Pengawasan Intern Berbasis Risiko dengan Kematangan Manajemen Risiko, dan Kapabilitas APIP.

Untuk memenuhi Kapabilitas APIP Level 3, salah satu *Key Performance Area* (KPA) elemen 3 (Praktik Profesional) yang wajib terpenuhi adalah APIP menyusun perencanaan pengawasan yang berbasis riaiko, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Matriks IACM

	Perandan Layanan (S KPA)	Elemen 2 Pengelolaan SDM [10 KPA]	Elemen 3 Praktik Profesional (7 SPA)	Elemen 4 Akuntabilitaa dan Manajemen Kinerja (7 KPA)	Elemen 5 Budaya dan Hubangan Organisasi (5 KPA)	Elemen 6 Struktur Tata Kelola (7 KPA)		
Level 5 - Optimizing (8 KPA)	APIP diakui sebagui agen perubahan	Pimpinan APIP berperan aktif dalam organisasi profesi	Praktik profesional dikembangkan secara berkelanjutan	Laporan efektivitas APIP kepada publik	Hubungan berjalan elekti dan terus-menerus	Independensi, kemampuan, dan kewenangan penuh API		
		Proyeksi tenaga/tim kerja	APIP memiliki Perencanaan strategis					
Level 4 - Monaged	Jaminan menyehnuh atas	APIP berkontribusi terhadap pengembangan manajemen	Strategi audit memanfaatkan manajemen	Penggabungan ukuran kinerja kualitatif dan	Pimpinan APIP mampu memberikan saran dan	Pengawasan independen terhadap kegiatan APIP		
(E KPA)	tata kelola, manajemen	APIP mendukung organisasi profesi	risiko organisasi	kuantitatif	mempengaruhi jajaran manajemen organisasi			
	risiko, dan pengendalian	Perencanaan tenaga/tim kerja						
Level 3 - Integrated (15 KPA)	Layanan Membangun tim dan Konsultansi kompetensinya		Kualitas kerangka kerja manajemen	Pengukuran kinerja	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan Saran dan Penjaminan	Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi		
Level 3 - Lay Integrated Kos (15 KPA) Aus ush	Audit kinerja/ unhe for money	Pegawai yang berkualifikasi profesional	Perencanaan audit terbasia risiko	Informasi hisya		Pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP		
	medit	Koordinani tim		Pelaporan manajemen APIP	Komponen Manajemen Tim yang Integral	Mekanisme pendanaan		
Level 2 - Visibucture (10 KPA)	Audit Ketaatan	Pengembangan profesi individu	Kerangka kerja praktik profesional dan prosesnya	Anggaran operazional kegiatan APIP	Pengelolaan organisasi AMP	Akses penuh terhadap Informasi organisasi, aset dan SDM		
		Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten	Perencanaan pengawasan berdasarkan priori tas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun		

Sumber: Diterjemahkan dari IACM for Public Sector, 2017

Sedangkan posisi Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dalam Matriks grand design yang mengaitkan antara tingkat kematangan manajemen risiko, dengan implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) dan Kapabilitas APIP (IACM) dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Level	Level Level dan Karakteristik Level dan Manajemen Risiko Kapabilit		Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR		
Level 3	risk defined: telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	Integrated: APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	- Fasilitasi internalisasi MR - Audit Ketaatan (control based audit) - Audit Kinerja (process based audit) - Audit efektivitas pengendalian (risk based audit)	<ul> <li>Perka 24/2013 tentang         Pedoman Pelaksanaan CSA     </li> <li>Perdep PKD 4/2019 tentang         Pengelolaan Risiko Pemda     </li> <li>Pedoman Audit Kinerja         Berbasis Risiko     </li> <li>Pedoman Audit Ketaatan         Berbasis Risiko     </li> <li>Pedoman Perencanaan         Pengawasan Berbasis Risiko     </li> </ul>	- Bab V poin E - Bab VI poin E (risk based audit) dan F (perpaduan risk based audit dan audit ketaatan/ kinerja)		
Level 4	risk managed: telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko	Managed: APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	- Fasilitasi sesuai kebutuhan pengembangan - Audit Ketaatan (control based audit) - Audit Kinerja (process based audit) - Audit efektivitas pengendalian (risk based audit)  (risk based audit)	<ul> <li>Pedoman Audit Kinerja         Berbasis Risiko     </li> <li>Pedoman Audit Ketaatan         Berbasis Risiko     </li> <li>Juklak Pengawasan Intern         Berbasis Risiko     </li> </ul>	- Bab V poin F - Bab VI poin G		

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan <i>Outcome</i> Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
Level 1	risk naive : belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	Initial: APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata Kelola sesuai peraturan dan mencegah tindak penyimpangan	- Fasilitasi penerapan MR  - Audit Ketaatan (control based audit)  - Audit Kinerja (process based audit)	<ul> <li>Perka 24/2013 tentang</li> <li>Pedoman Pelaksanaan CSA</li> <li>Perdep PKD 4/2019 tentang</li> <li>Pengelolaan Risiko Pemda</li> <li>Pedoman audit ketaatan</li> <li>dan audit kinerja sesuai</li> <li>standar</li> </ul>	- Bab V poin B dan D - Bab VI poin D (audit ketaatan dan audit kinerja), tidak diatur secara khusus
Level 2	risk aware : pendekatan manajemen risiko yang masih silo	Infrastructure: APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan dengan menerapkan perencanaan pengawasan yang berbasis prioritas manajemen	- Fasilitasi penerapan MR - Audit Ketaatan (control based audit) - Audit Kinerja (process based audit)	<ul> <li>Perka 24/2013 tentang         Pedoman Pelaksanaan CSA     </li> <li>Perdep PKD 4/2019 tentang         Pengelolaan Risiko Pemda     </li> <li>Pedoman audit ketaatan         dan audit kinerja sesuai         standar     </li> </ul>	- Bab V poin D - Bab VI poin D, tidak diatur secara khusus

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan <i>Outcome</i> Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman	Sistematika dalam Juklak PIBR
			- Audit manajemen risiko keseluruhan (risk management based audit)		
Level 5	risk optimized : manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	Optimizing : APIP menjadi agen perubahan	- Fasilitasi sesuai permintaan - Audit Ketaatan (control based audit) - Audit Kinerja (process based audit) - Audit efektivitas pengendalian (risk based audit) - Audit manajemen risiko keseluruhan (risk management based audit)	<ul> <li>Pedoman Audit Kinerja         Berbasis Risiko</li> <li>Pedoman Audit Ketaatan         Berbasis Risiko</li> <li>Juklak Pengawasan Intern         Berbasis Risiko</li> </ul>	- Bab V poin F - Bab VI poin G

## B. Langkah - Langkah PPBR

Dalam petunjuk pelaksanaan ini yang dimaksud dengan PPBR meliputi tahap 1 (Penilaian Kematangan Manajemen Risiko) dan tahap 2 (Perencanaan Pengawasan) dari seluruh proses PIBR. Langkah-langkah yang perlu dilakukan APIP dalam melaksanakan PPBR secara umum yaitu:

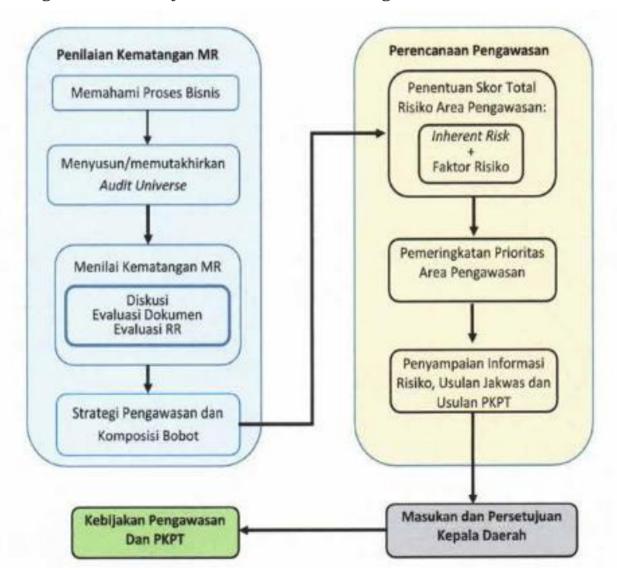
#### Tahap 1 - Penilaian Kematangan Manajemen Risiko

- 1. Memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Menyusun/memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan.
- 3. Menilai kematangan MR.
- 4. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pernbobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen

#### Tahap 2 - Perencanaan Pengawasan

- 5. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan.
- 6. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.
- 7. Penyampaian Informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Diagram Proses Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko



#### BAB III PENILAIAN KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

## A. Memahami Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah

Langkah pertama dalam proses menilai kematangan MR yaitu APIP memahami proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk memperoleh pemahaman atas proses bisnis Pernda, APIP dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penelaahan dokurnen, seperti:

- 1. Dokumen Perencanaan (RPJMN-RPJMD-Renstra-Renja-RKT-APBD-DPA).
- 2. Peraturan-peraturan terkait tugas dan kewajiban Pemda.
- 3. Mekanisme Pelaporan Akuntabilitas.
- 4. Struktur organisasi, tata laksana dan tanggungjawab masing-masing satuan kerja.
- 5. Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait manajemen risiko.
- 6. Register risiko.
- 7. Temuan hasil auditekstemal/internal, pengaduan masyarakat, kasus hukum, betita media massa.
- 8. Informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemda.

Pemahaman proses bisnis diperlukan untuk memudahkan pengkategorian yang digunakan APIP Daerah dalam menyusun peta auditan dan memastikan area pengawasan yang dimasukkan ke dalam peta auditan masih relevan.

#### B. Menyusun/Memutakhirkan Audit Universe/Peta Auditan

Langkah-langkah penyusunan/pemutakhiran peta auditan adalah sebagai berikut:

1. Kelompokkan area pengawasan

Pengelompokan area pengawasan membantu APIP dalam mengidentifikasi dan memperbandingkan prioritas pengawasan. Pengelompokan dapat dilakukan:

a. Berdasarkan tujuan

Contoh: Area pengawasan adalah seluruh sasaran/program prioritas dalam RPJMD.

b. Berdasarkan risk owner

Contoh: Area pengawasan adalah risiko kepala daerah, risiko pejabat eselon 2 atau risiko pejabat eselon 3 dan 4.

c. Berdasarkan satuan kerja

Contoh: Area pengawasan adalah satuan kerja tingkat OPD/kecamatan/BUMD/Lainnya atau satuan kerja tingkat desa/puskesmas/sekolah/UPTD.

d. Berdasarkan proses

Contoh: area pengawasan adalah proses pengelolaan SDM, proses pengelolaan BMD, dan sebagainya.

- 2. Kumpulkan data relevan per masing-masing kelompok area pengawasan.
- 3. Inventarisasi informasi tambahan terkait area pengawasan, sebagai contoh informasi terkait anggaran dan atensi masyarakat baik di media sosial maupun media massa (elektronik dan/atau cetak), temuan dan tindak lanjutnya, potensi *fraud* dan kasus hukum serta informasi-informasi lainnya.

Peta auditan disusun pertama kali pada tahun yang sarna dengan saat Pemda menyusun RPJMD dan register rislko strategis Pemda. Peta auditan akan dimutakhirkan setiap tahun untuk memastikan peta auditan masih relevan. Contoh kertas kerja penyusunan peta auditan disajikan pada Lampiran 1 *Audit Universe*.

### C. Menilai Kematangan Manajemen Risiko

Setelah menyusun/memutakhirkan peta auditan, APIP menilai kematangan MR satuan kerja (OPD/Kecamatan/BUMD/Satuan kerja Lain) dengan Jangkah-langkah sebagai berikut :

1. Lakukan diskusi untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman pimpinan dan manajemen terhadap kematangan MR

Auditor perlu berdiskusi dengan pimpinan satuan kerja dan para pengelola risiko untuk mengetahui pemahaman pimpinan dan jajaran manajemen mengenai maturitas MR; apa yang sudah dilakukan organisasi untuk meningkatkan kematangan MR; apakah pengelola risiko merasa yakin bahwa register risiko sudah menyeluruh; dan apakah pimpinan dan jajaran manajemen telah menyadari tanggung jawabnya untuk mengidentifikasi, menilai, menangani serta memonitor kerangka kerja MR dan respons pada risiko. Diskusi dapat dilakukan secara langsung (bertemu fisik) maupun melalui media (telepon, daring, dsb).

#### 2. Dapatkan dokumen terkait MR

Untuk mendukung informasi dari hasil diskusi, auditor perlu memperoleh dokumen yang relevan dengan penilaian kematangan MR. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen yang menunjukkan berbagai informasi yang terkait dengan manajemen risiko, seperti tujuan organisasi, bagaimana risiko dianalisis dari sisi dampak maupun keterjadian, proses penilaian risiko, selera risiko organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan dan memandang risiko dalam penentuan keputusan, dan register risiko.

Alat ukur yang digunakan untuk menilai kematangan MR, akan diatur dalam pedoman terpisah.

#### 3. Melakukan evaluasi register risiko

Untuk satuan kerja yang belum pemah dilakukan penilaian kematangan MR atau satuan kerja yang kematangan MR-nya masih berada pada Level 1, 2, dan 3, APIP harus memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, penilaian dampak dan keterjadian telah dilakukan dengan memadai, dan pengendalian yang memadai telah diterapkan. Untuk itu APIP perlu melakukan evaluasi register risiko

dan rencana pengendalian yang telah ada. Adapun langkah-langkah dalam evaluasi register risiko dan rencana pengendalian adalah sebagai berikut:

- a. Dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- b. Dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD- Renja-DPA);
- c. Dapatkan Dokumen register risiko terbaru yang sudah di update;
- d. Dapatkan informasi-informasi terkait proses bisnis organisasi dan data-data historis seperti: hasil audit sebelumnya, laporan capaian kinerja organisasi, kejadian-kejadian penting yang pemah dialami organisasi, dan informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan;
- e. Lakukan analisis atas ketepatan penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis OPD maupun tingkat operasional OPD, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah selaras dengan konteks tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD-Renstra);
- f. Lakukan evaluasi ketepatan perumusan risiko apakah risiko yang teridentifikasi telah menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi (4W1H), sehingga berpotensi berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pastikan bahwa risiko bukanlah negasi tujuan (membalik tujuan);
- g. Lakukan evaluasi apakah penyebab terjadinya risiko telah mencerminkan penyebab hakiki (root cause), sehingga pengendalian risiko dapat langsung "menghilangkan" akar penyebab risiko. Akar penyebab terjadinya risiko biasanya mengarah pada kurangnya sumber daya SM(Man, Money, Machine, Method, Materials;
- h. Lakukan analisis apakah penetapan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan dampak terjadinya risiko telah sesuai dengan data-data historis dan pembandingan (benchmarking) kondisi serupa di tempat lain serta informasi-informasi penting/kredibel lainnya yang dapat dijadikan rujukan. Bandingkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko pada register risiko dengan kriteria yang terdapat pada kebijakan MR Pemda;
- Lakukan analisis apakah pengendalian yang direncanakan mampu "menghilangkan/mengurangi" penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas)dan/ atau dampak terjadinya risiko;
- j. Lakukan wawancara dan konfirmasi untuk memastikan pengujian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami risiko, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, serta mengidentifikasi risiko yang melekat pada setiap

kegiatan/program yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Apakah penetapan risiko operasional OPD, risiko strategis OPD dan risiko strategis Pemerintah Daerah telah tepat, apakah masih ada risiko kunci/utama/signifikan yang belum diidentifikasi oleh manajemen:

- k. Lakukan klarifikasi terhadap kejadian-kejadian pen ting yang terjadi setelah tanggal perumusan register risiko sampai dengan saat evaluasi keandalan register risiko yang memilikipengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko yang jarang terjadi namun dampaknya sangat besar, bagaimana manajemen memantaunya; dan
- 1. Lakukan pembahasan hasil evaluasi dengan satuan kerja pemilik risiko. Diperlukan prosedur agar auditor dapat menyampaikan permasalahan/isu yang ditemukan dan prosedur untuk memperoleh persetujuan manajemen untuk meng-update register risiko. Dalam bertindak, auditor harus menegakkan prinsip dasar bahwa manajemenlah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko. Register risiko hasil evaluasi perlu divalidasi/disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai tingkat risikonya (pimpinan-pimpinan satuan kerja terkait, dan apabila risiko strategis Pemda divalidasi oleh Kepala Daerah).

Catatan: Jika pada saat penyusunan register risiko dan rencana pengendalian telah difasilitasi oleh APIP atau pihak berkompeten lainnya, dan jeda waktu antara penyusunan register risiko dan evaluasi register risiko tidak terlalu jauh, auditor tidak perlu melakukan evaluasi register risiko dan rencana pengendalian secara mendalam. Auditor cukup melakukan scanning apakah terdapat halhal yang perlu menjadi perhatian.

Contoh kertas kerja hasil evaluasi register risiko dapat dilihat pada Lampiran 2 Evaluasi RR.

#### 4. Menyimpulkan tingkat kematangan MR

Auditor menggunakan informasi dari hasil diskusi dan pemahaman dokumen untuk menilai dan menyimpulkan tingkat maturitas MR satuan kerja. Auditor menyimpulkan tingkat maturitas MR ke dalam 5 tingkatan yaitu: risk naive; risk aware; risk defined; risk managed; a tau risk enabled dengan memperhatikan karakteristik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Karakteristik Kematangan MR setiap Level

No	Level Kematangan	Karakteristik Level					
1	Risk Naive (Level 1)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko <i>risk naive</i> belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko.					
2	Risk Aware (Level 2)	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko risk aware memiliki karakteristik pendekatan manajemen risiko yang masih silo.					
3	Risk Defined (Level 3)	Organisasi yang risk defined telah memiliki strategi dan kebijakan terkait manajemen risiko serta telah dikomunikasikan, diimplementasikan dan manajemen organisasi juga telah menetapkan selera risiko.					
4	Risk Managed (Level 4)	Organisasi dengan status risk managed telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (enterprise approach) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko					
5	Risk Enabled	Organisasi dengan tingkat kematangan manajemen					

Sebagai langkah awal penerapan PPBR, dalam penilaian kematangan Manajemen Risiko, APIP Daerah dapat mengadopsi Skor Maturitas SPIP satuan kerja yang bersangkutan. Skor maturitas SPIP yang digunakan adalah skor maturitas SPIP secara menyeluruh [kelima unsur) bukan hanya pada elemen 2 yang terkait dengan penilaian risiko. Namun, apabila satuan kerja belum memiliki skor maturitas SPIP, APIP dapat menggunakan skor maturitas SPIP Pemda.

Hubungan tingkat kematangan maturitas SPIP dengan tingkat kematangan manajemen risiko tergambar sebagai berikut:

LEVEL	MATURITAS	SKOR	KEMATANGAN	LEVEL
SPIP	SPIP	SKOK	MATURITAS	DE VEE
0	Belum Ada	$0 \le \text{skor} < 1,0$	-	ı
1	Rintisan	$1,0 \le \text{skor} < 2,0$	Risk naive	1
2	Berkembang	$2.0 \le \text{skor} < 3.0$	Risk aware	2
3	Terdefinisi	$3.0 \le \text{skor} < 4.0$	Risk Defined	3
4	Terkelola	$4.0 \le \text{skor} < 4.5$	Risk manaqed	4
5	Optimum	5	Risk enabled	5

Tabel 3.3 Level Maturitas SPIP Dihubungkan dengan Level Kematangan Manajemen Risiko

D. Menentukan Strategi Pengawasan dan Komposisi Pembobotan Antara Register Risiko dan Faktor Pertimbangan Manajemen.

Setelah APIP mendapat kesimpulan tingkat kematangan manajemen risiko organisasi atau satuan kerja, maka APIP menentukan (I) strategi pengawasan (overall audit strategy) dan (2) komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen

1. Strategi Pengawasan

Strategi pengawasan intern berbasis risiko dibedakan menjadi tlga kelompok

1) Satuan kerja (OPD/kecamatan/BUMD/satuan kerja lain) dengan kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance dengan pendekatan *control based* atau *process based*, dan melakukan fasilitasi bagaimana menerapkan manajemen risiko untuk mendorong perbaikan governance, risk dan control satuan kerja dan organisasi.

2) Satuan kerja dengan kematangan manajemen risiko sedang (Level 3)

Metode pengawasan yang dapat diterapkan adalah assurance control based dan process based dan risk-based auditing (pengawasan berbasis risiko) untuk perbaikan efektivitas pengendalian. Fasilitasi masih diperlukan utamanya untuk mendorong internalisasi manajemen risiko dalam proses bisnis.

3) Satuan kerja dengan rnaturitas manajemen risiko tinggi (Level 4 dan 5)

Metode pengawasan yang diterapkan adalah pengawasan atas efektivitas manajemen risiko secara keseluruhan (risk-management based auditing) dan risk-based serta masih dimungkinkan untuk melaksanakan control based dan process based. Sedangkan fasilitasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3.4 Perencanaan	Strategi nengawasan	(overall audit strategy)
Tabel J. I dicheanaan	onangi pengawasan	l joverali addit strategyj

Level MR	Jenis Penga	wasan
Level MIK	Assurance	Consulting
Level 1	- Control Based Audit	Fasilitasi Penerapan MR sesuai kebijakan MR
Level 2	- Proccess Based Audit	Pemda yang mengacu Perdep 4/2019
Level 3	- Control Based Audit	Fasilitasi dalam rangka
	- Proccess Based Audit	intenalisasi MR dalam
	- Control Based Audit	Proses Bisnis
Level 4	- Control Based Audit	Fasilitasi dilakukan
	- Proccess Based Audit	sesuai Kebutuhan
Level 5	- Control Based Audit	
	- Risk management-based	
	Audit.	

2. Komposisi penilaian antara register risiko dan faktor pertimbangan manajemen.

Penetapan komposisi besamya Pertimbangan Manajemen (faktor risiko] dalam penentuan area pengawasan berbanding terbalik dengan nilai kematangan manajemen risiko. Ketika kematangan MR sudah semakin matang, maka bobot penggunaan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) akan sernakin meningkat serta bobot pertimbangan Manajemen semak:in berkurang. Penetapan komposisi tersebut diatur melalui kebijakan Inspektur (Pedoman PPBR) setelah mendapat masukan dari Pimpinan Daerah. Dalam hal ini, APIP sangat disarankan untuk mendorong penerapan manajemen risiko dengan menggunakan register risiko suatu area pengawasan dengan mengevaluasi dan mengintegrasikan dengan strategi/rencana pengawasan APIP.

#### Contoh penerapan:

- a. Jika tingkat kematangan MR rendah (Level 1 dan Level 2), maka RR setelah dievaluasi oleh APIP bobot RR yang ditetapkan adalah 40% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sebesar 60%;
- b. Jika tingkat kematangan MR telah mencapai Level 3, maka RR setelah dievaluasi oleh APIP diberikan bobot 70% dan bobot faktorfaktor pertimbangan manajemen 30%;
- c. Jika tingkat kematangan MR tinggi (Level 4 dan 5), maka RR manajemen OPD dapat diandalkan sehingga bobot RR yang ditetapkan adalah 90% dan bobot faktor-faktor pertimbangan manajemen sama dengan 10%; dan
- d. Pada kondisi suatu area pengawasan belum menerapkan manajemen risiko, belum memiliki register risiko, APIP

menggunakan seluruhnya (100%) faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko).

Contoh kertas kerja simpulan kematangan MR dan pembobotan register risiko disajikan pada Lampiran 3 Kematangan MR dan Pembobotan Register Risiko.

#### BAB IV PERENCANAAN PENGAWASAN

#### A. Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

Dalam menentukan skor total risiko area pengawasan, APIPDaerah mempertimbangkan sumber informasi yaitu (1) risiko bawaan (Inherent risk) dalam Register Risiko dan (2) faktor-faktor pertimbangan manajemen (faktor risiko). Contoh penentuan skor total risiko area pengawasan sebagaimana tabel 4.1

NO.	ADDA DONGAMAGAN	Inheren Risk			Faktor Perimbangan Manajemen							m . 1
	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Nilai	Skala	Bobot	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala	Bobot	Total Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
1	Area Pengawasan 1	11	3	40%	4	2	1	4	4	2,9	60%	2,9
2	Area Pengawasan 2	10	2	70%	2	2	1	3	3	2,1	30%	2,0
3	Area Pengawasan 3	16	4	40%	5	3	3	4	4	3,8	60%	3,9
4	Area Pengawasan 4	18	4	70%	4	4	4	5	4	4,15	30%	4,0

Tabel 4.1 Contoh Penentuan Skor Total Risiko Area Pengawasan

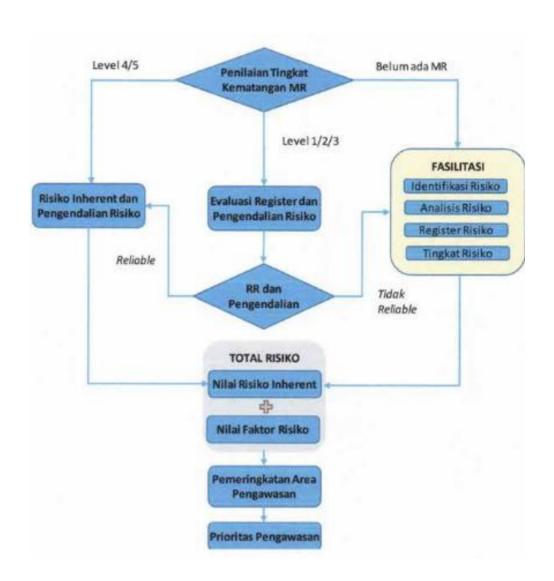
#### Keterangan:

- (1) Nomor urut;
- (2) Nama area pengawasan;
- (3) Nilai Inherent risk yang terdapat pada register risiko;
- (4) Skala dari Nilai Inherent risk (dapat dilihat pada tabel 4.3);
- (5) Bobot Nilai Inherent risk berdasarkan tingkat kematangan MR;
- (6) Perhitungan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen (dapat dilihat pada tabel 4.3);
- (7) Skala gabungan dari Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen;
- (8) Bobot Nilai Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen berdasarkan tingkat kematangan MR; dan
- (9) Total risiko yaitu penjumlahan antara skala Inherent risk dan skala Faktor-Faktor Pertimbangan Manajemen yang telah dikalikan bobotnya masing-masing.

#### 1. Pertimbangan Inherent risk dalam Register Risiko

APIP Daerah dapat menggunakan inherent risk berdasarkan basil penilaian risi.ko dalam register risi.ko apabila skor kematangan MR organisasi berada pada Level 4 atau 5. Terhadap organisasi dengan tingkat kematangan manajemen risiko di bawah Level 4, APIPDaerah terlebih dahulu mengevaluasi register risiko sebelum nilai inherent risk digunakan dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Hubungan tingkat kematangan

MR dengan penggunaan skor *inherent risk* untuk menentukan skor total risiko area pengawasan disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dan Penggunaan Register Risiko

Dalam rangka menentukan skor total risiko area pengawasan, apabila dalam satu area pengawasan terdapat lebih dari satu risiko teridentifikasi, APIP perlu menggabungkan (komposit) nilai risiko area pengawasan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nilai risiko masing- masing area pengawasan dapat diperbandingkan. Cara yang dapat dilakukan APIP untuk menggabungkan nilai risiko adalah dengan mengkalikan Rata-rata Level Kemungkinan (RUK) dan Rata-rata Level Dampak (RLD) dari seluruh risiko teridentifikasi dalam area pengawasan tersebut.

Tabel 4.2 Contoh perhitungan nilai risiko komposit area pengawasan

No	Area pengawasan	Daftar risiko	Level damp ak	Level Kemu ngkin an	Besar an risiko	RLD	RLK	Nilai risiko komp osit	
1	area pengawasan 1	risiko 1	4	3	12	4,33	2,67	11.69	
		risiko 2	5	2	10				
		risiko 3	4	3	12				
2	area pengawasan 2	risiko 1	2	5	10	2,33	4,33	10.09	
		risiko 3	3	3	9				
		risiko 4	2	5	10				
3	area pengawasan 3	risiko 1	3	5	15	3,00	5,00	15,00	
4	area pengawasan 4	risiko 1	5	3	15	4,50	4,00	18,00	
	2000-14-Norm-School School	risiko 2	4	5	20				

#### 2. Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (faktor risiko)

Disamping inherent risk pada area pengawasan, untuk menampung adanya permintaan-permintaan yang merupakan prioritas manajemen serta kebutuhan APIP seperti pengalaman, kemampuan SDM dan lain- lain, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko untuk menyeleksi area pengawasan yang akan menjadi objek pengawasan. APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari APIP Daerah.

APIP Daerah dapat mengembangkan faktor risiko yang tepat untuk area pengawasan di Pemda berdasarkan ciri-ciri operasinya. Informasi yang digunakan auditor untuk menentukan faktor risiko dapat diperoleh dari beragam sumber yang bervariasi, misalnya dari pengamatan atas hasil audit sebelumnya dari atau konsultasinya dengan KepaJa Daerah/Komite Pengawasan Manajemen (Management Oversight). Agar penggunaannya konsisten, faktor risiko dan kriteria penilaiannya harus dibakukan dalam suatu daftar kriteria penilaian. Auditor intern dianjurkan menggunakan faktor risiko sejumlah 5 sampai dengan 7 faktor risiko (MIPI, 2018).

Berikut beberapa contoh faktor risiko yang dapat digunakan oleh APIP Daerah untuk menilai risiko suatu area pengawasan antara lain:

#### a. Anggaran

Semakin tinggi anggaran dalam suatu area pengawasan, maka akan semakin tinggi pula skor untuk menjadi objek pengawasan.

- b. Keterkaitan program dengan sektor unggulan daerah dan RPJMN Jika suatu area pengawasan termasuk dalam sektor unggulan Pemerintah Daerah maka area pengawasan tersebut patut menjadi prioritas dalam kegiatan pengawasan. Selain itu, penilaian atas keterkaitan program dalam RPJMDdengan tujuan/sasaran RPJMN digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi program dalam RPJMD mendukung pencapaian tujuan nasional. Jika indikator Kinerja program dalam RPJMD mendukung RPJMN, maka area pengawasan tersebut perlu diprioritaskan dalam kegiatan pengawasan.
- c. Temuan dan tindak lanjutnya, serta potensi *fraud* dan kasus hukum

Temuan auditor ekstemal dan internal atas program dan persentase tindak lanjut, potensi fraud, serta kasus hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Semakin tinggi skor suatu program terhadap faktor pertimbangan manajemen tersebut merupakan indikasi bahwa manajemen risiko program belum berjalan dengan baik.

d. Isu terkini terkait program

Isu terkini yang berkaitan dengan program dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan prioritas pengawasan. Isu terkini tersebut mencakup adanya sorotan masyarakat, adanya isu nasional, adanya keterkaitan program terhadap layanan publik, dan apakah program mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

e. Pertimbangan lain dan pennintaan oleh stakeholders

Pertimbangan lain yang digunakan untuk pemeringkatan program yang menjadi prioritas pengawasan dapat berupa kemampuan APIP dalam melaksanakan penugasan dan jangka waktu terakhir dilakukannya kegiatan pengawasan pada program tersebut.

Faktor risiko harus diberikan nilai dan bobot untuk membedakan tinggi rendahnya risiko area pengawasan. Salah satu metode sederhana adalah dengan penggunaan skala interval 5 yaitu skor 5 lima merupakan batas tertinggi dan skor 1 adalah skor terendah. Agar penerapannya konsisten, APIPsebaiknya membakukan angka faktor risiko ke dalam tabel yang mudah dipahami.

Cara penyusunan yang umum dilakukan adalah pengumpulan informasi tentang kelornpok area pengawasan dan menginventarisasi atribut yang dapat digunakan sebagai faktor risiko. Sebagai contoh, APIP Daerah dapat menggunakan faktor risiko pada tabel 4.3 untuk menetapkan nilai dan bobot faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD. Sedangkan untuk kelompok area pengawasan desa, APIP Daerah dapat langsung

menggunakan 12 faktor risiko yang ada dalam Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).

Contoh kertas kerja perhitungan faktor risiko untuk area pengawasan sasaran/program prioritas dalam RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 4, Lampiran 5, Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Dalam menentukan prioritas area pengawasan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian bagi APIP yaitu "Permintaan dari stakeholder yang terkait". Apabila terdapat area pengawasan yang menjadi perhatian stakeholder dan APIP diminta untuk melakukan pengawasan atas area pengawasan tersebut, maka APIP wajib memasukkan area pengawasan tersebut dalam rencana pengawasan tanpa mempertimbangkan nilai risiko. Sebagai contoh: Kepala Daerah meminta APIP melakukan audit atas Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan, maka APIP wajib memasukkan rencana pengawasan atas area pengawasan tersebut ke dalam PKPT,walaupun nilai risikonya rendah.

Tabel 4.3 Faktor-faktor Pertimbangan Manajemen (Faktor Risiko) untuk Kelompok

No.	INDIKATOR			SKALA
		1	2	3
	Nilai Risiko Inheren	1-5	6 - 10	11 - 15
1	% Anggaran (Bobot = 25%)	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <2%	Perbandingan anggaran Program terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <5%	Perbandingan anggaran Prog terhadap anggaran Belanja Langsung APBD <10%
2	Program termasuk dalam sektor unggulan daerah dan mendukung RPUMN/RPUMD (Bobot = 25%)	Program: - Tidak Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program: -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Tidak Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah	Program : -Terkait langsung tujuan/sasaran RPJMD -Mendukung RPJMN -Tidak Termasuk sektor unggulan daerah
	Signifikansi Satker dalam mencapai tujuan RPUMD (untuk Arsa Pengawasan Kelompok Satker/OPD)	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda S2%	Indikator Kinerja Satker terhadap Total Indikator Kinerja Pemda \$5%	indikator Kinerja Satker terhadapTotal Indikator Kin Pemda ≶10%
3	Temuan dan tindak lanjut, Potensi fraud, Kasus hukum terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 20%)	Jika tidak ada kondisi:  -Penyelesaian atas temuan auditor internal s 95%  -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal s 90%  -Ada potensi fraud  -Ada kasus hukum	Jikal kondisi terpenuhi: -Penyelessian stas temuan auditor internal ≤ 95% -Penyelessian atas temuan auditor eksternai ≤ 90% -Ada potensi fraud -Ada kasus hukum	Jika 2 kondisi terpenuhi:  -Penyelesaian atas temuan auditor internal s 95%  -Penyelesaian atas temuan auditor eksternal s 90%  -Ada potensi fraud  -Ada kasus hukum
4	Isu Tekrini terkait Program (Bobot = 15%)	Jika tidak eda kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 1 kondisi: -Ada sorotan masyarakat -Ada isu nasional -Terkait layanan publik -Berpengaruh hajat hidup orang banyak	Jika terpenuhi 2 kondisi:  -Ada sorotan masyarakat  -Ada isu nasional  -Terkait layanan publik  -Berpengaruh hajat hidup or banyak
5	Pertimbangan Lain terkait Program/Satker/OPD/Area Pengawasan (Bobot = 15%)	-Tahun terakhir dilakukan audit tahun lalu -SDM APIP belum pernah melakukan penugasan yang sejenia	-Tahun terakhir dilakukan audit 2 tahun lalu -SDM APIP sudah 1x melakukan penugasan yang sejenis	-Tahun terakhir dilakukan audit 3 tahun lalu -SDM APIP sudah 2x melaku penugasan yang sejenis

B. Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan 1 sampai dengan 5 tahun.

Pada tahap ini, APIP telah memiliki penilaian risiko atas masing-masing area pengawasan. Langkah selanjutnya, APLP melakukan pemeringkatan area pengawasan dan frekuensi pengawasan yang akan dilakukan sampai dengan lima tahun kedepan berdasarkan nilai risiko masing-masing area pengawasan.

Berdasarkan basil perhitungan risiko, dengan maksimal bobot risiko 5 sebagaimana tabel 4.1, APIP dapat menyusun prioritas pengawasan sampai dengan 5 tahun, yaitu:

- 1. Total Bobot Risiko 3-5 (zona merah), maka dilakukan audit setiap tahun
- 2. Total Bobot Risiko 2-3 (zona kuning), maka dilakukan audit setiap 2 3 tahun
- 3. Total Bobot Risiko 0-2 (zona hijau), maka dilakukan audit setiap 4-5 tahun.

Tabel 4.4 Contoh Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan. 1 sampai dengan 5 tahun

3.1	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	Skala	Paktor Pertimbangan Manajemen						Total	Tingkat	Frekuensi	Rencana Pengawasan				
NO		Inheren t Risk	FR 1	FR 2	FR 3	FR 4	FR 5	Skala	Risiko	Risiko	Pengawasan	202X	X+1	X+2	X+3	X+4
1	Area Pengawasan 1	3	4	2	1	4	4	2.9	2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	х		х		×
2	Area Pengawasan 2	2	2	2	1	3	3	2.1	2.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali		X			X
3	Area Pengawasan 3	4	5	3	3	4	4	3.8	3.9	Tinggi	1 tahun sekali	х	X	х	х	×
4	Area Pengawasan 4	4	4	4	4	5	4	4.15	4.0	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali	x	x	x	x	X

Pemeringkatan Prioritas Area Pengawasan l sampai dengan 5 tahun dilakukan atas seluruh kelompok area pengawasan, antara lain :

- 1. Sasaran atau Program Prioritas dalam RPJMD
- 2. OPD/Kecamatan/BUMD/Unit Kerja Lain
- 3. Desa/Puskesmas/Sekolah/UPTD

Contoh penyusunan Prioritas Area pengawasan dapat dilihat pada Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10.

C. Penyampaian informasi Risiko, Usulan Kebijakan Pengawasan dan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan kepada Pimpinan Daerah.

Pada tahap ini, APIP menyampaikan informasi risiko, usulan kebijakan pengawasan (Jakwas) dan usulan PKPT sebagai bahan agenda yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah/Komite Pengawas.

1. Penyampaian Informasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian kematangan MR satuan kerja, APIP menyampaikan profil risiko satuan kerja beserta usulan strategi pengawasan dan jenis penugasan yang akan dilakukan yaitu apakah berupa jasa penugasan konsultasi/fasilitasi atau penugasan assurance.

2. Usulan kebijakan pengawasan.

Setelah area pengawasan diperingkatkan berdasarkan basil penyusunan prioritas area pengawasan, langkah selanjutnya adalah menyusun usulan kebijakan pengawasan (Jakwas). Usulan Jakwas tersebut memuat informasi mengenai rencana pengawasan pada tahun selanjutnya, yang antara lain berisi:

- a. Nama objek/unit yang akan diaudit;
- b. Total nilai risiko (inherent risk dan faktor risiko);
- c. Frekuensi dan waktu dilaksanakan pengawasan;
- d. Jenis Pengawasan yang akan dilaksanakan (consulting atau assurance); dan
- e. Sumber daya yang dibutuhkan dan sebagainya.

Usulan Jakwas akan selalu dimutakhirkan setiap tahun sesuai dengan informasi-informasi yang selalu dimutakhirkan dalam peta auditan, terutama mengikuti perkembangan kematangan MR masing-masing area pengawasan serta arahan/masukan/pemintaan Kepala Daerah.

Contoh penyusunan prioritas pengawasan sebagai usulan Jakwas dapat dilihat pada Lampiran 11.

#### 3. Usulan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT berisi berbagai macam informasi terkait dengan rencana audit di tahun selanjutnya. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan ujung dari tahap perencanaan yang sifatnya makro.

Langkah-langkah pemilihan area pengawasan dalam penyusunan



Gambar 4.2 Langkah-langkah Pemilihan Area pengawasan

Masing-masing langkah diuraikan sebagai berikut:

a. Menetapkan kegiatan APIP yang wajib dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko (mandatory)

Kegiatan-kegiatan pengawasan APJP yang wajib dimasukkan ke dalam perencanaan pengawasan tahunan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko yaitu:

1) Penugasan audit tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat.

- 2) Permintaan manajemen/pimpinan yang bersifat rnendesak (urgent) untuk melakukan pengawasan terhadap suatu program atau kegiatan tertentu yang mendesak (urgent) bagi pencapaian tujuan daerah.
- 3) Penugasan yang merupakan amanat peraturan perundangan atau mandat bagi APIP, antara lain reviu RKA, reviu LKPD, dan evaluasi LAKIP.

Bila dalam penugasan mandatory ini terdapat beberapa area pengawasan yang akan diuji, APIP dapat mempertimbangkan nilai risiko, maupun faktor risiko sebagai alat untuk memilih prioritas/urusan rencana pengawasannya.

#### Contoh:

- 1) Kepala Daerah mewajibkan APJP melakukan pengawasan atas penggunaan Dana Desa, namun Kepala Daerah tidak menentukan desa mana yang harus dilakukan pengawasan. Dalam kondisi tersebut, APIP dapat memilih area pengawasan Desa yang memiliki nilai risiko ketidaktaatan tertinggi berdasarkan faktor-faktor risiko yang ada, sehingga tidak semua Desa dilakukan pengawasan setiap tahun.
- 2) Reviu atas Laporan Keuangan OPD, maka APIP dapat memprioritaskan pada OPD dengan risiko ketidaktaatan terti.nggi, misal (a) atas ketidaksesuaian dengan SAP; (b) atas aset BMD yang tidak tercatat; (c) potensi masalah berdasarkan temuan BPK tahun lalu; dsb

Contoh penetapan kegiatan yang wajib dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 12. Mengidentifikasi area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan.

- b. Area pengawasan yang tidak dimasukkan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP adalah area pengawasan yang menjadi objek pengawasan pihak lain (BPK, BPKP, dan APIP lain) pada tahun yang sama dengan pengawasan yang dilakukan APIP. Contoh penetapan kegiatan yang tidak dimasukkan dalam usulan PKPT dapat dilihat pada Lampiran 13.
- c. Menetapkan area pengawasan yang akan dilakukan pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko.

#### 4. Permintaan masukan dan persetujuan

Usulan PKPTyang telah selesai disusun, selanjutnya pada akhir tahun sebelumnya, diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan masukan dan persetujuan menjadi PKPT. Adapun informasi yang disampaikan antara lain:

- a. Daftar Area pengawasan;
- b. Dokumen Matriks Risiko dan Pengendaliannya;
- c. Dokumen rencana pengawasan tahunan;

- d. Analisis atas risiko dan dampak adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; dan
- e. Analisis atas risiko dan dampak tidak dilaksanakan rencana pengawasan atas risiko yang telah diidentifikasi.

Contoh format PKPT dapat dilihat pada Lampiran 14

Dengan disetujuinya usulan PKPT tersebut oleb Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, maka PKPT sebagai rencana pengawasan tersebut siap dilaksanakan APIP pada tahun anggaran berjalan.

#### NUMBER OF THE PROPERTY AND PROPERTY AND

					80,648					REAGANA STRATERIS SPD				Pingare		Spinar.	
	Super RF-MS	Transport Rejayers	Second Se	heatestar Laborate	Program ST (m)	hadropton Strongeres	SPECIAN Parameter	PERA	National Street on Assess Report to	Andrews Named Suspens	fregion	noness Program	August Frances	Previous serior	Notice designation	Service Services	See Se
7	the trappation brother and the them	75	No. Supposes	Angle Sale	Francis Walk basis	Principles	Black From the an flori Articular and	Photo S	Man (B)	1 Non- an ora seton:	Title	76 Ferrylater	1711 164 465		Salar .	Testing.	- 3
	en oppe, kriegge vereille vereinen, verte, petter im file gen verein verte, petter im file gen verein legen file opper de deze stret vereinen file verein blieg vereinen file gette vegete blieg vereinen file gette begen.			Market Ma	For release (lease througho) Tables	APE, APE Paraliforn David			Salvania (Latina Auromotiva National Na	2. August nicht gestellte 2. August nicht gestellte (12) 4. August nicht gestellte (12) 4. August nicht gestellte (12)	Indian Provides	SPT. SPT Frankline Seaso		Marchines report 65 July Ass 164 July 164 July	manus magazini manus	Services Services rem Services	
					Name Available Manager	The beginned of the beginned o	President in the Landson	liter (			Austrian Stranger	Service des Service des Prontagnatur Profession Mala- Pariabetur Montagili	10.276.286.886	Mariah Aury Tream Mit (Adi)	and the last of th	Address formats Safe-Text States particular float	(Walter)
					Frague Peringtone Bat, Periddit On Tringa Salar 1995 av	From Larvet Trouge Francis on Trouge Transmitted (mg	Days Familia y des terraleum	Marie W	-	-	Program Personal Mass Personal Core Personal Core Corporations	Name provide Transport Association And Transport Association Survey Transport	Onton	Service par Service Service	inter contract contract contract	all sees	Tagora Population gary technic Street parted State (treet)
			Managedings series has been has present	International Control	Program Light House and Tree	Analysis to - total - total - total - total	Shor location	Har-1	-		Program distra Emphasis Treas			Secretary server (et year, for- per year)	Political control organism character	Authors in the Co.	
					Prograf Updy Polymer Named Stepands	Aprille Bywens Standardson	MID)	Hart.	•	H	Palagram Direga Palagram Sa ample: Whoplest of		MEMBER	No. of Art of Column Str. (Add.) (No. Str. (Add.)	Salar salar salar salar salar		Total Solutions Solutions SOLE per
-			+	-	Propert Formulation Property	Section 2	MOUNT .	Mary .	-	4-	Negrot .	-	J09406.861	hersking toler	Sec.	-	NAME OF
					National and Programm Man.	Inchesion Constitution Secretaria Secretaria					Periodolas Petrosas Petrosas Per Petrosas Petros		A PROJECT COL	Int has been	mpper mpper hand		
					Program Krouriske its Innivid	Company of the Compan	See hustoer	har t			Pergen Facilities to he And		1500 N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Herabitisti, Notes All Calif. See Not path	CANAL		

Smith Formula Kenton, Kinda Identificati Make Strategie Persentation Deemh. Green Walle Piller : Parelellian

Nema Penda Nema (NS) Tahun Pendalah Provintin Provintitatopaleritata XYZ

Disas Parefultura

- 3056E

Printed yang at the

Forum RPUMD Typus (2016-2021)

237	Petratriplan	Linear West Dool	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			BESIELOM EYALDARI						JETHELIAN.		The second secon
	Topogramma.			·		Beach			Contract		Shake	Made	Miles	Recents Thotal Perspendictor
	Braingre	Inditator Kinarja	Montes	Cook Walto	Perelli	Pater .	Switzer	67040	Chalmo	Filteli yang	(Company)	Committee	Photo:	
9.	(R) Separate Citationals	(0)		- 60.		in .	(8)	186		ent-	1500	. [18]	- [14]	(%)
	Precide to													
	Merchijk stryk alraestritter dan persynthesi peraktikas pada semala jerjang peraktikas													
89	Program Warts Sengar Pendistran Dasar Sentidan Tanun	1. Angula Resturbite Terris serkidan	Congrue nout met uits setistisk urtik bestesykh	ASP1	Fagura Downshi	Kurangnya Buhagan dari persahilah dapah untuk menala minat balajar anak	arternal.	6	Trigline permissions areas remission	Presents Dreith, Brooks	,		10	Disjoit menganting selant tapata Deva amat mentining terrorit angka perbagaai selatah
1			). Kathalawara ya KY ka nampa projecilad sakulah anan	HSF 2	Repea Decyt	Tright of pergraphic massessful massif territors	Shakeron .	E	Meningratinja organ (uliu satistie)	Prosetta Outil, Soquet	,	•	- 4	Regard control tasks the model stone you allowed an expect point young covering manager
		Ferrighton AFS. AFE Frederica Crease	1 Congress may realize my has only the settle me has been associated.	639-3	Ropela Cherof	Foodersys perminence many for place perforance performs the force from proper production whether legic to represent the performance legic to represent at territory perception.		6	Angle Participal solicital recitati	Augus				Basel marginising until the equipment beam- point Service Page Beight & Aus Alex Autobase
			3 Kolomentakan banalar bana 600 ke sensaipi	BSP 4	Nuprio Decisio	Suitur arterija ladrijaracijaronitur panczewi sanar lus Bridenija	Witernal	0	Proces serge mangaja langunggo	Publish Stell, Ruper	- 3		- 10	Pugud monothibus kopigator is half prince dar the mole presistance higgs pelicone
*			3. Kerverspani debije wieli rendah	PSP'S	Repair Operat	funds and total age to its	Inmed	G.	Manunerrys Ingeld kendusen esset	Faneria Colletioner		1		Superioriental program bentury. PMT shall produce and program bentury.
	Mutu Pandidi Dan Terlega Kabendidikan	Roots Junton Teraga Pundets uter Teraga Kepandalaan yang pertuat/basi	Analose dans pergendengan Empetardi gan bilat monadal	MAP 1	Cappes Operat	Parititives PAD	rana		Manus yrren trigant tufulusan Gane	Procts Desk-Scenali	,			Expell managerature burnter processure: FAC descriptions processure paragraphics yang meaning actual peringkatan mich langga pendi

#### Potatisk Pringsien.

- Kodow (1) disk thereon namer and
- Colors (1) the bengan serve and Katers (2) the (10) disc temper below stitledge create with schape mans breaken stiller, RF-ME/Sanaha Katers (3) the (11) disc senger intinate trively bases stratege Katers (4) the (10) disc senger-encur pointing your introduction talks perception talks

- Kelem (State: (15) ditablenges hodo reika.
- Kater III day 000 day danger Familia saka juhakunt yang beranggang pepili berkaperingan untuk menganta raitu.
- Kalen (F) Ser (E) dischergen personne trobbings ficks, (Fried tempermanish blenthiss so belt ficks, seried fields have thintopyrise to describe the skyrar, Method America. Ser Material
- Koloro (M) the: (KZ) dies livriges sonder stake (enthercelleserne);
- Automatic Ray (27) along Sergian C. (Service) transport and a respectable or proceeding an extension of the control of the con
- Kolon (17) der (25) allei dangen pitukkatit yang mandattattukuna banpak (ka tulto bana-basar tarjad

- Colons (10) der (20) dies bergen state konungsinner terjastinve dete.
  Kolons (10) der (27) dies bergen state dempet bie nach sterbeitet krijkel
  Kolons (10) der (20) dies bergen beseit eine onter anter bereitet konungsinner demper state bergen
  Kolons (10) der (20) dies bergen missies Heidel programmen dem nach bereitet bereitet bestellt bereitet.
- Koton (M) disc flate rate Level Company year, juried storped rinks; alling Asserbas, Kourt India. Kolon (30) the Release Lend Semespror sets proof serurgines rate Step (certifie (sour) trees
- Kolon (21) disc there rathe pairs perhalisments and soot despet our race-content namenglines.

March mystycae; A PIP sericult clickus; dengon managemen.

DETELANDOMINAL COMPANY DISTRIBUTE Cale: or one Plants Person while Returns Land Potential Level West Higher STATE STATE OF Somethouse Meson Indiana Charles Spiel Built Provide . -Designation. **Ensuredinas** Europiech. 1186 1900 1940 (28) (81) (30) (34) 00 07 80 1990 100 0.0 36 (80) 0.0 Bassimo Stratagia Partella 1: the prophetry's administrate duri personalain pendidikan pada service (myseq pendiation Program Wald Swisse Paradiction 11 Angle Satarine 1 Kurangman Coppier Description Kurangnya Benergan Smartal Triplet. 111 Depart Sensitive Types the personalists course. Person sercetors melved school under pendidian was - Didi-Supel. Author of Stilla Atlan WITH MANUEL HOUSE Secretary. bender most 200 F Managharya Course Daniel Togetal persphasion Distance. N. Supel Part Sont Andy Koppaning-gua manyonabel transformation emple pota-Dutte Sopeth terriposito pray espir astronomi NEE management Expedit count pand burning metal at shared deal DANSEL . 7667 2 MANAGEMENT AND THE Program Porchalitary Marin 1981 Pervigeace APR, 1 Averagence Salaria Danieli 142 3.05 6.76 Bandsonya. Vilginial dist Brighe Perforance Bookets B Propert managements published APM Psychillran newspirital keep perturbansor srang has Elisterial plan postinguya sufficiely regulate. manyametral distance access Deleter Majt Susper & Alum or how workers neinpeticiphien. persidition are more House Elizableira Bobbs midacres. 3 Комерчи supplied by wide knowle requels manymisted. 350° 2. to course benefits as T. Supplandable Separa Douber. Return telesys-Princes belajar Supplied the nestplikes hydrosters Special and states. habitahan/palaadur Didle-Suppl herkelt prosess dans bog make minusia. SERVICE WARRANT personal development percentamin kingga palabaran Separate. describe. 1 Surveyan II Dural rentina propen. Superior Description Secretaria made Management Permit Societies about Notice and Authorities Project hasolusien | State Suppli Nanham MWT angle turkslark PRIP I reside... HOUR. Program Prologistics Mills Street Lands Allohost done Suprem Description mediately PAD Manufacture and Same Technology Palodolfi Dan Timaga Tenaga Pendulk Semperature spent **English Establisher** | Diction Support Kapandilihan Serv Terrolph nonpelever quite Expeciabilita's gang feltal insurantel becker floor

March 4

## CONTON DAFTAR TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIRD DAN PEMBOBOTAN REGISTER RISIRD UNIT KERJA. PEMERINTAN PROVINSJEABURATEN/KOTA EYZ

NO	thirt Range	Kensonger MR	Strateg Pergresser	Peritubates Register Walks	Kensoryes
(1)	- 2	(%)	(4)	(8)	041
3	Singlen Kessengan	2	Ferritasi perwespen MR dan audit Reteatury Newsys	40%	
2	(lagan Panemisean	1	Festital Interesional SITI des audit Anterior/crarja (antesia risika	70%	
1	Sagier Kepagawaran	1	du.	40%	
4	Deglar Pertianguese	3		70%	
5	Dinas Ope Karya	- 1		40%	
1	Circun time Marge	2		40%	
7	Direct Society	3		70%	
A	Dinas Kabakaran	1		40%	
1	Dinas Penispronias	2		40%	
19	Dines Lingtunger	1		40%	
11	Dinas Pontapaten Grend	1		70%	
12	Dinos Kesahotor	1		70%	
13	Dines Fereiditar	1		70%	
14	Ones Pshubunger	1		70%	
15	Drive Persots ten Olah Rege			70%	
18	Dross Retahasan Pangan, Kaksutan, dan Pelantan	1		0%	Belan meniliki Ri
17	Exepute	1		70%	
18	Sedan Pangelois Aust Desish	3		70%	
19	Baden Periotoso Satu Pintu	1		70%	
20	RILD	1		40%	
25	Suinyterial CPRO	1		70%	
22	Gramatan A	1		70%	
23	Ocamatan 8	1		70%	
26	Kecamatan C	1		70%	
25	Necessation (I)	2		40%	
26	Kecamatan I	3		70%	

## Peturjuk Pengsian:

- (1) Dilai nomor unut Unit Kerja
- (2) Diisi nama Unit Kerja
- (3) Dissi tingkat kematangan Manajemon Risiko Unit Kerja
- (4) Disi strateg-pengawasan yang akan dilakukan Inspekturat
- (5) Dibi bobut inherent risk yang terdapat dalam register risiko, berdasarkan tingkat kematangan Manajemen Bisiko
- (6) Disi informasi lain yang menjelaskan bi pada kolom sebelumnya (bila diperlukan)

#### PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ANDGARAN PEMERINTAH PROVINSIKABUPATENNOTA XYZ

No	Nama Program	Nama OPO	Anggaran	Persentane terhadap Retorija Langaung (%)	Shali
(7)	(2)	(3)	(4)	(2)	(8)
_1	Program Wajib Selajar Pendidikan	Dinas Pendidikan dan	3,017,008,000	0.68	1
	Program Pendidikan Menengah		16,270,200,000	3.18	7
	Program Peningkatan Mutu Pondidis		1,250,000,000	0.26	1
	Program poninglistim pemberantissan	Sekretanist Decrah	651,353,918	0.14	
	Program Karjasama Informasi dan		647,025,000	0.13	
	Program Panatase dan		511,318,498	0.11	1.
	Program Peningkatan Kapasitas	Sekretariot DPRO	12,782,668,564	2.66	- 2
-8	Program Peningkatan Sarana dan		2,523,882,590	0.52	-1
- 9	Program Upaya Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan	20,077,655,360	4.18	- 2
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan		209,650,000	0.04	- 1
	Program Peningkatan Pelayanan		6,344,834,352	1.22	- 1
	Program Kasehatan ibu dan Asak		2,626,523,590	2.86	-1:
	Program Partialism (iki: Masyarokat		258,884,800	0.06	1
	Program Pangembangan Pembegoon		Z,478,555,050	0.52	
	Program Pengendation des		645,858,000	0.13	
15	Program Pembangunan Jalan dan	Dinas Pekerjaan Umum dan	81,904,885,895	17.04	5
	Program Rehabilitasii Preneiharase		4,373,835,717	0.61	1.
	Program Pengembangan Kinesa	4	25,047,138,724	5.21	3
	Program Pengembangan Wilayah		0,619,130,565	1.29	
	Program Penataan Bangunan dan		14,563,638,234	2.63	_E
	Program Pembergunan	Dinas Pengelolaan Sumber Days	1,125,000,000	0.23	
	Program Pangambangan dan		24,546,878,000	\$.11	2
	Pragram Pengendalian Banjir		2,920,000,000	9.61	
	Program Pembangunan Prasarana dan	Diras Perhusungan	1,016.535,000	0.21	- 1:
	Program peningkatan pelayaran		768,145,100	5.19	
	Program Pembongunor Sorano dan		1,075,599,990	0.22	-1
	Program Pongendelian Poncemaran	Dinas Lingkungan Hidup	658,744,100	0.18	
잗	Program Peningkatan kualites dan		471,885,747	0.10	
	Program Peningkatan Pengeedalan		964,551,000	0.20	-1
	Program Penatsan Administrasi	Dinas Kependudukun dan	4,127,837,100	0.88	
	Program Polayanan den Rohabilbas	Dinex Social, Pemberdayean	271,195,400	0.05	
	Pengusian kalembagaan		167,310,000	0.02	
	Program Perlindungan anak	According to the Control of the Cont	109,915,000	0.02	_1
	Program Perlindungen Konsumen dan	Disas Koperasi, UNKV.	818,852,400	0.17	-1
	Program Peringkalan Efficiensi		15,560,272,400	3.33	1
20	Program Poningkolan Kapasilas liptok		127,345,000	0.03	-1
ᆀ	Program Pongambangan Industri Kacil		555,282,000	0.12	
20	Program Pengembangan Sentra-sentra		14,660,424,000	3.13	Ì
	Pragram Peningkatan Promosi dan	(Dinas Penaraman Model	287,619,900	0.09	- 1
	Program Peningkolan littire Investora		106,010,600	9.62	1
	Program Peningkalan Palayanan		389,584,700	0.08	_1
42	Program peningkalan peran serta	Dinas Pariwisata, Persuda dan	1,077,217,000	0.22	
	Program pembinaan dan		379,590,000	0.08	- 1
	Program Pengembangan Penasuran		509.564,900	0.19	
	Program Pongembangen Dostinasi		3,254,889,000	0.67	1
16	Program Pongembangan SDM dan		655,520,000	0.15	- 1
4.7	Program peningkalan keamanan dan	Saturn Polisi Persong Phaja dan	1,287,038,750	0,26	1
	Program Penanganan Tanggas		1,354,241,000	0.22	
69	Program Peningkatan Katahanan	Dinas Pangan	963,875,115	0.20	
	Pragram Peningkatan Diversifikasi		689,889,900	0.54	1
	Program Peningkatan Keberdayaan	Dinas Pontorty Masykt dan	135,600,000	0.03	- 1
	Program Pemberdayaan Lembaga		578,413,665	0.52	
23	Pemberdayean lembaga sosial dan		1,055,939,079	0.22	
	Peningkaran Serana dan Prasarana		6,401,221,445	1.33	
	Program Pengembangan Budaya Baca	Dinas Keersipar dan	667,781,100	0.54	
	Program perbaikan sistem administrasi		28,790,000	0.01	- 1
	Program penyelamatan dan pelestatian		135,299,100	9,55	1
	Program Peningkatan Kualitas		42,409,000	0.01	-1
	Program Peningketen Penerapee	Dinas Tanaman Pangan,	1,052,316,400	0.22	1
	Pragram Peningketen Produks		2,669,289,000	0.90	-
	Program Peningkatan Kelendugaan		1,613,825,200	0.34	-
	Program Persedican dan		6,580,544,129	1.59	÷

No	Nama Program	Nama OPD	Anggaran	Persentase terhadap Belanja Langsung (%)	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
63	Program Pembangunan Jalan dan	Dinas Perumahan Rakyat,	1,150,000,000	0.24	1
64	Program Saluran Drainaso/ Gorong-		41,044,142,164	8.54	2
65	Program Pengembangan Perumahan		11,643,698,716	2.42	2
66	Program Pengembangan dan	Dinas Perikanan	5,826,718,700	1.21	1
	Program Peningkatan Produksi		1,489,636,600	0.31	1
68	Program Pencegahan dan	Dinas Peternakan dan Kesehatan	512,045,596	0.11	1
69	Program Peningkatan Produksi Hasil		2,792,339,801	0.58	. 1
70	Program Peningkatan Pemasaran		267,354,289	0.06	- 1
	Program Peningkatan Penerapan		1,357,090,000	0.28	1
72	Program Kerjasama Informasi dan	Dinas Komunikasi dan	333,732,600	0.07	1
	Program Peningkatan akses Informasi		2,861,286,317	0.60	1
	Program Penyelenggaraan E-		5,071,490,698	1.26	1
	Program Peningkatan Kualitas dan	Dinas Tenaga Kerja dan	419,212,000	0.09	1
	Program Pengembangan Wilayah		4,641,831,800	0.97	1
77	Program perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan	754,868,198	0.16	1
78	Program perencanaan prasarana		305,159,000	0.06	1
	Program Pendidikan Kedinasan	Badan Kepegawaian dan	2,203,169,713	0.46	1
80	Progam Peningkatan dan	Badan Pengelolaan Keuangan	3,252,812,982	0.68	1
	Progam Peningkatan dan	Badan Pendapatan	2,373,475,230	0.49	1
	Program Penanganan Tanggap	Badan Penanggulangan Bencana	595,001,229	0.12	1
	Program pengadaan, peningkatan	Rumah Sakit Umum Dagrah	19,361,628,351	4.03	2
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		65,306,138,600	13.58	A
	Total Belanja Langsung dalam APBO		480,735,870,545		

#### Petunjuk Pengisian:

- (1) Disi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diki Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi Jumlah anggaran program pada tahun X-1 sesuai APBO
- (5) Disi persentase anggaran program dibundingkan dengan total belanja langsung dalam APBD
- [6] Disi skala tingkat risiko program berdasarkan persentase anggaran

## PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

ROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM MENDUKUNG RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	SKALA
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ar Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	3	5
Menengah	Company of the same with the same section .	1	1	0	2	3
n Mutu Pendidik dan		- 1	1	0	2	3
n Mutu	Pendidik dan	Pendidik dan	Pendidik dan 1	Pendidik dan 1 1	Pendidik dan 1 1 0	Pendidik dan 1 1 0 2

## Petunjuk Pengisian:

- (1) Dilsi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah program terkait dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD
- (5) Diisi apakah program mendukung tujuan/indikator dalam RPJMN
- (6) Diisi apakah program termasuk sektor unggulan daerah
- (7) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5) dan (6)
- (8) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan prioritas program dan sektor unggulan

#### catatan:

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Diisi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

Lampiran Pedoman Nomor 6 Contoh Kertas Kerja Perhitungan Faktor Risiko Temuan dan Tindak Lanjut, Potensi Fraud, Kasus Hukum

#### PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ

VIII-		SIGNAL COMPANY OF A STREET AND A STREET						
NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum	Nilai	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ogram Wajib Belajar Pendidikan Dasar ambilan Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	1	4	5
2 Pri	ogram Pendidikan Menengah		1	0	1	0	2	3
	ogram Peningkatan Mutu Pendidik dan enaga Kependidikan		1	1	1	0	3	4

#### Petunjuk Pengislan:

- (1) Dilsi nomor urut Program Prioritas
- (2) Diisi nama nama Program Prioritas
- (3) Diisi Unit Kerja Penanggungjawab Program
- (4) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor internal atas program masih dibawah 95%
- (S) Diisi apakah penyelesaian temuan auditor eksternal atas program masih dibawah 90%
- (6) Diisi apakah ada potensi fraud atas program
- (7) Diisi apakah terdapat kasus hukum atas program
- (8) Diisi dengan jumlah kolom (4), (5), (6) dan (7)
- (9) Diisi skala tingkat risiko program berdasarkan Tindak Lanjut Temuan, Potensi Fraud dan Kasus Hukum

#### catatan:

- bila jawaban "Ya", maka diisi dengan angka "1".
- bila jawaban "Tidak", maka diisi dengan angka "0"
- Dilsi berdasarkan informasi hasil pemahaman proses bisnis

PENEVERNAL PROPERTY AREA PENEMANTANA. KILLINGS PROBESH BY,MD POSSESSION PROVISIONABLE NOT WHAT IN THE

Apablic territoral area pengerusornyo menupakan pemintyan KCHUNIAN berwareng and whole stars companies by broaden

	SHIP LABOURNING	officers federated	MARK (PE PERSONAL PERSONAL PER	Special Company of the Company of th	jaines.	-	-		Maga			alilla.			DAR IL LINEAU LI		-			-	griss (		/	THE COLOR	Loan	-	-	Probaced: Propagation	Jees.	200	141	261	,
							=	Tina.	fuere			-	tens	1	Iten		-	- The facility	-	Name of Street	les a	Terresitate apportuna depressing	free	Side Spiter Name	Sign Spine Spine	TOTAL MENSO	THE PE						
	III PERSONNEL	(6	W	- 8	×	m	76	M	M	п	96	10.	(94)	(%)	N	(15)	100	146	90	20)	10	(16)	(0)	109)	DH	(15)	\$16	19			(90)		_
400	property) is an any open Maph Swige whither Swar Swiden Aus		Dissa Psolidher, nya fieladjessai			un.			127700.00	84		1	8					*		PERMIT LIVER				MA	44	40	11	/Telus solid	,	,	,		-
150	open Feelifeen					100	847	13	5,70,26.00	360	S.		-33	*	1	3	E	,	123	OTHER PERSON.	10			-	4M	18	100	Fraffish solveille	*	×	×	×	
2 2 3	upper Participation Halls make the Tomage marketing				4	48.	3		1.00.00.00	140	1				1	*		,	1	19800-1184				-17	43	34	-	Take peak			1	,	-
2 2 2	ET BEBNATHA ETCAVAN PREDICTES DE FARES																																Г
F									ESILURIO II				_								=												F

#### PUTOSCASE PENSIONAL

- Disk design rather and area senganises
- Trist danger program arisinfas dalam RF,NES
- Drief Strogger smaller Assumes allias progners:
- Shi despe sang thi Kara Persopprephasi (sambala) pulatenta Proyran.
- this target sales and fails probable any that management Program
- Stid Strape Stight Sensburger Managemen Rotts (Inth Sarts Ferningsrighent Program
- The Responses a service and datast regions facility berignoring dropper benature. Moralmon Riving
- The design retail raths despit resident class Someth analysis.
- Diet dergen obala eine todie sexual bebieben manuseren tube: protet
- Wite Broke 1 S, shale 1 berget vertical What Name 4 - 9, study - 7 freedati.
- Wite Botto F E. maio 1 E Senteng
- Milel Belly & 35 shall + 4 Shept
- Mary Ratio 19 25, aboth 1 (semple trough)
- THE THE SHARE SHIRLD ANGUSER STREET FAIRS STREET
- The drags parameter certainings adolescents require progress despite total engages belong lengthing
- TIS Sins among place before rights progress proces before the performant factor rights progress.

- This designs who fables likely program around herbita bonis perfolances fables rigiles program angualism
- 80 The tanger phase faither males properties service for the transport fluence faither make a region properties.
- Our danger viter below reader person harries her to perfoll reages fettion cabbs between dear throat burjust, posterne froat days advant touries tradered
- the design once failth right securiteries only certifying talls index security fails some fact to take the security fails and security fails and the security fails are security fails and the security fails and the security fails are security fails and the security fai
- Ħ Site danger risk better rights sesse bertes bette partitionper better make as tartist
- STAL BASSON strate SMSSC TRETTS WAS AN IN THE SAMPLE SAMPLE SAMPLE STATE FAMILY TO SAMPLE SAM
- the length latter take that district and there I discrete what with what?
- 99 Distribution strate faither rights further for writer risked passed durings beliefulus faither risks. Disk duringer perspektyres 60°F asolub particle religiously perspektyrals also program
- Diel dinger obeis folder tides pergainnen AFP serses dinger tellstates falter radia
- The despire confidence and this state Personance and transfer and transfer and the females and transfer and t
- the RM should prevent with me toy to become the Phile Dervices Late, Information for both rate inc. take the description
- Die Neigen gertentiere Nation riebe seewe bematerigen Honogener Parks und Koria proprogressionen angewe.
- The thropin palvings (critic) faster really seaso virigor hobbase fatter risks.
- The forest astronge shall howest risk day shall faller risks shallow personance tracks making
- Discharacipes and hind prints (0.1 second hands), 1-2 second, 3-5 sectors, 3-4 tings, 1-5 second fings). 農
- Dire deligned moralisms from personal particular particular better finder, communication modes and market performance of the personal particular personal personal
- 200 Siler denges rememe rather strakulture prosessepore

#### PENTUSURAN PERSERTAS AREA PENSAWASAN. KELDHIPOK OPO/NECAMATAN/BUMB/MRT KEDUK CANNYA. PENEDENDAR PROVIDE ANAROPATRIANCES AND

Apabilis terdapat auditable unit yg merupekan permintaan KOHFelhak benwerrong lain, maka apolitole unit tab-

					_		_	_	_	_								_	langeur	g men	jadi pric	ontas wo	Mapun						_	_
	MEN PENSAMUSAN SAROMABLE (INIT)	LEVIL NO.	acontro testano		mainte.	Anton	adaig :		inte int		TEMOR TEL PO STA POTENCI SOT	MANU MANUAL MANUAL	War No	**		140	tenturyan Maa	ajeman t	atom	1	FAICTO	R PIGING	15	TAL.	Fraktorel Nanginetsen	3000	70+0	394	845	300
			BARRIED .			The Section 1	701		1000	13%	Bullet	100	Bellet	775	Ballet 1		Ballet C	150	Bates 1	IN.							1	100	1000	1000
				***	Statute	Antqueres				Anala	-	Sheke.	-		n-Pipe Apade President	ja pa	Programme Appr	desta	Per ecolore 4204	testa	Distant Facility White	Patrick Patrick Tracks	TOTAL RESIDED	THURSAY MISSES						
	9	86		01	H	(7)	N	95	199	10	.00	200	09	198	N	m	.00	100	.DB.	SN.	(750	CON.	04	200	DH			(89		
According to the Control of the	UNIT REBLACEPS or Kovarigori	7	46%	100	Uda	1,017,096,000	1,00	1	1	1.5	10			. 1.	1	-	PERSON S	int.			115	AA.	4.5	Suspen Trappa	TEMOTORIAL	10	1			1
2 Baga	er Personalahen	7	ARTE			19,370,300,000	48.54		1		- 17			10	1	1	PERMIT S				475	4.88	3.4		Flattet tested		×	1	10	X
0.00	н Коридиналия	T	465	-		1,250,090,000	1000	1	7	- 1	-70	1	- 1	1	-1	1	PERMISSIS BALL	. 1			685	4.75	44	Sangar Tergal	1 Yeloo ereali	1		-3	1	1
n Bings	ur Penberguran	1	MIN		111	160,717,010	171						1		1		PERMIT.	*			**	176		Strates	A c. of 3 harvan person				1	
	Covertiens	1	-503	- 0	100	94,490,010		112			- Ann	1		100		-	Hillman I	900 M				CONT.	3.5		23/23 Street March	-	3			1.7
	Blac Harge	1	105	- 1	10.4	\$49,718,85b.		100	- 1	- 1	1	100	- 1	100	17		PERMIT	-			KIN.	175	2.9	Septem .	Exil Continueston	3		- 3		
Street		1	100	1		45,65233					1	100		- 1			PERSONAL S	-			10%	173	23		Englished and		1		1	1
	Saltabaryon	1	1605	1	100	MO, DO AND		100			-	100		-			PERSONAL S	1			685	10 to	15	Section	A p. g. S. Saltium method:			- 8		1.5
	Personner	1	1405	1		Felt. 947,040		-	-		1	10.5			100		Hilbert I	-1-			10%	196	2.8	Stations	2 s # 3 lphon aghali		8	100	1	1000
	Instrum	- 1	MAN.	+	-	HELTHALESE		-			-	1	-	-			HERman I	-	_	_	163	113	2.5	- State of	2 s.d.2 labor natural		1		1	-
	Pentilative South	- 1	WIN.	1	-	456,810,429		100	-		-	-		-		-	PERMANAS.	-		_	-885-	5.10	-23		2 to 2 School setols	-	2		- 5	-
	Reservoires	- 1	475	1 1	100	1,046,997,899		100	-		-	100		-		1	PRINCES	-	_		675	7.75	2.5		Jan Dieber artist	- 5		1		-
	Permittee	- 1	475	+ +		940,747,799 621,656,756		100	-	1	-	100	- 1				PRINCES 1	-	-	_	100	1.5	2.5	Being	2 s.d 2 letter set of	- 2	-	- 8	-	+-
	Fertubinger Fertubinger		(2) -	1 2	-	498 PRI 565		100	1	1	-	100		-		100	PERMIT	100	_	_	-103-	100	15	Seekery	2 s.d 2 Sphys setul.		8	-	+	-
	Retahasan Pangan,		Sec.	1 2	-	346,345,649		-			1	100			_	-	PERMANA 1	-			- MA		- 55	Series .	End I token net of	_	-	- 4	-	1 4
Berry			100	1	-	Northead Section		177	-		1	1000		-			PERSON I	-		_	10%	THE	775	lanta na	Ind 2 takes settled			1	-	1 2
	Pengetita Assi Sastah		ace.	- 1	111	409,000,000		100			1	11301	1		1	100	remain 5	1		_	MILE		12	Sadera	Test Thebas person	7	_			10
	e Personale Sale Forbs		1973	1		400,000,000		100	1		- 1	100	- 1			SERVICE STREET	PERMIT	1000			1675		1/8	Sec.	A s. of S Sphus Bell of	-	- 3		-	+-
e letter			100	1 6	100	405,000,000					18	100	- 1			Mary 1	PERSON I	100			100	100	197	Familie	A S of P Makes metall		- 1			-
	charted SPACE	1	100	- 0		468,009,669					1.0					20.00	PERSONAL S	. 5			C LOCAL DE	100	- 63	latera.	I said before private	- 10	-	1.		100
Catho		- 31	401.	1 1	2.40	400,004,000		1000		95.00	1	11.35	- 1		District Con-	95 10	PERSONAL ST	1			10%	10111	17	Select	J. Lat. 3 Select Select		16			1 2
) Crass		1.3				600,000,000		200			100	137	- 3	4.0		00 to 100	PRESIDENT	- 3			100%	1.79	2.7	Destroy	J. S. E. S. Markett State of		7			1 2
A Section			16/2	1 1	100	603,003,000	1.19	1000	100		I I	Mary Service	100	100		Distance.	reproduces 5	100			105	109	12		Table 3 Tollion selson		18			1 8
d Season		1.1	45%	1 6		465,550,000	1277	100			1		- 2	7			PERMIT	0.80			101	100	1.5	- Indiana	J n.d. 3 (after miss)	2		- 1		1 8
	mater 6	1.0	40%	10.0		409,003,009	127	100,000	1.0	100	1	1000	- 1		1	100	PRINCES 1	100		-	495	100 T 100	9.8		Tax Status salas	- 8		1		1 8

#### PETUNISH PENERSON

- 25. Other dampin representative break perspectation.
- [2] Drief Bengen Unit Kertis yang situ pada Fernarintah Essendi.
- (2) Diei dengen Beglist bematangan Manajamen Rinika Unit Kerja-
- (A) Disc parger State inherent risk deten register helite bendeserher längtet kemalang Manutemen Risiks
- (5) Drie mingen nital risiba detem register risita (batislah evalueri).
- Der Berger State nick nicke sessei betrijden mensjemen nicke, oprech, Nick Korto I S. (Itala 1 (conget evolet))
- 1004 Rosks 1 10. Skets 2 (rendati)
- Notice Rooms 18 75, Skelar v 3 (switzing)
- Hotal Holies N. 25, Shota + 6 (Snap).
- Hotel Walks 28 25, Shalk + 5 Samuel Singal (f) Diei dengen jumish anggeren belante langsung unit kerte dalam APBI
- (E) Chic danger persenties perhandinger anters (until augustum tetanja tangs ong unit kerja dengan retal anguaran belania tangsang
- 55 Disc dangen Skulp hatter mette anggaren sesses terries kerja perhitungan bister malin anggaren.
- (III) Die dergen stat beter riefte eigeffranzi SPD terhalise pencapsian bijeun 6F3xID.

  (III) Die dergen bleis beter riefte eigeffranzi und berla berhalise sentrasione bileun 6F3xID senser dengen beführten facher riefte.

- Still despire State Hitter Hitte Inmon der Hotel Setter, peteral fraut der entryk baryk felhan beson Bonger Lebbahan faller Hitle
- Dilet danger, edge terrer risely, too berkins
- Stati dengan Skala laktor rimke inu terkini pencal devigan kebilakan taktor rimke
- 040 040 040 070 070 070 070 070 Sini dengan tombal tahun listah disakukan sadi Elahan T dikurangi tahun audit terastur)
- Dissi dengan State lektor midde Sahuri Sarakhir plaudit semai megan kebipakan Sahbr malas
- Other designs perspectation APP application permits make trade programming and also programs
- Dini dengan Stola laktor ripika pengalaman APIP semai dengan kubijakan telaar ripika
- Died designs switcher perceivages auch Dife adul. Perceivages publishes berated dell Republish Special District size. Physio Receivage, Depolicies. Relaboration Pergession Management, perceivage, pe
- Died MPS, tells and commission smill darf Kepielo Starrah at to PRost Servenany Lain, teleproti rain des feiter reste Leis Edek Siper Sedengkan.
- 無田 Disci despan persektion forbit radio sessai benstangan Matazanes Kistis Unit Kerja penynggangkesib program
- 200 Wed despire patricipat, furtials fabler risible beneal despire habitation fables risible.
- 0.9 Diel dergen gefrengen Shale inflorent nick den Shale helter nicks direkten parasnipearye manag-manag
- 6330 Blid betweenen stat that that there (it I sampe review to I regist, 2-1 series, 3-4 fings, 4-5 sanger regist Obsi dengan returna trebuenzi pangamianan sersuai dengan tetai retia namakin tinggi maka pamatin apring dilabuhan pangamasan.
- Blini dengan rencets taken diskuttan penganwaan

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN Apabila terdapat auditable unit yg merupakan KELOMPOK DESA/PUSKESMAS/SEKOLAH/UPTO parmintaga KDEIdinbak benyopang lain, maka

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XYZ Permintaan KDH/pihak berwenang lain, maka auditble unit tsb langsung menjadi prioritas walance parhitungan risikonya kecil

			_	_	_	_	-		_	-						watapu	r parmittingan	пакопуа кесп					
90	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)		FAKTO	OR RIS	IKO KEW	ANGAN		,	AKTOR	RISIKO	NON K	EUANGA	W	Pertimbo Hanajemen I		11	DYAL	Frekuensi	20XX	X+1	X+2	X+3	X+
			_											Bobet: 11	10%			Pengawasan	200		A	Week	
		FRI	FRZ	FR 3	FR4	FRS	FRA	FRI	FRZ	FRID	FRA	FR 5	FR &	Permistoan KEH/Pihak Berwenang Lain	Nital	TOTAL RISIKO	TINGKAT RISIKO						
(1)	(2)			_	(3)						(4)			(5)	(4)	(7)	(8)	(9)			(10)		
1	DESA					1	1							100000	-			Control of the same		100	10000	This is	
1	Dens AA	4	- 4		5 3	3	3	5	4	3	3	2	4			3.6	Theggs	1 tehun sekali	X	X	X	X	1
2	Dena AB	3	4	1	4 3	- 1	3	3	3	3	3	4	3			3.3	Tinggi	I tahun sekati	X	X	×	X	
3	Desa AC	5	- 4		3 )	4	3	. 3	5	3	3	2	5			3.4	Tinggi	I tahun sekali	X	X	X	X	
4	Desa AD	. 5	- 4		3		3	- 6	5	3	3	3	5			3.8	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	×	X	
5	Desa AE	3	- 4	-	4 3	- 4	3	2	3	3	1	- 3	1			3.3	Tinggi	1 tahun sekali	X	X	X	X	
4	Desis AH	3	- 4		2 3	1	3	2	3	3	3	3	1			2.9	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		
7	Desa Al	2			2 3	- 2	3	2	2	3	3	2	2			2.5	Sections	2 a.d 3 tahun sekali		X		X	
8	Desa AJ	- 2	- 4		2 3	- 2	3	3	2	3	- 3	- 3	3			2.9	Sedang	2 s.d 3 tatum sokali		X		X	
9	Deta AQ	3	- 4	1	2 3	2	3	- 3	3	3	- 3	2	3				Sedany	Z s.d 3 tahun sekali	12	X		X	
	Desa AR	2	- 4		2 3	1	3	- 2	2	3	3	2	2	4		2.5	Sedang	2 a.d 3 tahun sekali		X			-
	Dysa AS	3	4		2 3	2	3	. 2	- 3	3	3	2	1			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali-	-1	X		44	
12	Desa AT	- A	- 4		1 )	- 2	2	2	1	3	3	2	4			3.0	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali	X		X		
13	Desa AU	3	- 4		2 3	1	3	- 2	3	1	- 3	2	3			2.8	Sedang	2 s.d 3 tahun sakali	X		×		

#### PETUNJUK PENGISIAN

- Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- Diisi dengan nama Desa/Sekolah/Puskesmas/UPTD yang ada pada Pemerintah Daerah.
- Dissi dengan hasil penilaian fakter-faktor risike keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- Dissi dengan hasil penilalan faktor-faktor risiko non keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- Disi dengan sumber permintaan audit (bila ada). Permintaan audit bisa berasal dani Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lainnya (Kepolisian, Kejaksaan, Pengaduan Masyarakat, Tim Management Oversight, dab).
- Diisi 100% bita ada permintaan audit dari Kepala Daerah atau Pihak Berwenang Lain, Inherent risk dan fakter risiko tain tidak dipertimbangkan.
- Disi dengan gabungan bobot faktor risiko keuangan dan bobot faktor risiko nen keuangan (dapat merujuk ke Siswaskeudes)
- Dissi keterangan atas total bobol risiko (0-1 sangat rendah, 1-2 rendah, 2-3 sedang, 3-4 tinggi, 4-5 sangat tinggi)
- Diisi dengan rencana frekuensi pengawasan sesuai dengan total nilai risiko, semakin tinggi maka semakin sering dilakukan pengawasan
- Diisi dengan rencana tahun dilakukan pengawasan

#### PRIORITAS RENCANA PENGAWASAN TAHUN 202X+1

NO	NAMA AREA PENGAWASAN	TOTAL RISIKO	JENIS PENGAWASAN	KEBUTUHAN SON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Wajib Belajar Pendicikan Casar Sembilan Tahun	4.3	AUDIT KINERJA	45 HP
	Program Pendidikan Menengah	4.6	AUDIT KETAATAN	45 HP
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.3	AUDIT KETAATAN	45 HP
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pertahan	2.5	AUDIT KETAATAN	45 HP
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
6	Program Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4.0	AUDIT PBJ	45 HP
9	Program Pengembangan Pemasaran Parlwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
10	Program Pengembangan Destinasi Penwisata	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
11	Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepanwisataan	4.0	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
12	Program pengadaan, peningkalan sarana dan prasarana rumah sakitihumah sakit jiwahumah sakit paru-parui rumah sakit mata	4.0	AUDIT KETAATAN	45 HP
13	Program Upaya Kasahatan Dasar	3.9	AUDIT KINERJA	45 HP
14	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jeringan Ingasi, Rawa dan Jeringan Pengaliran Lairreya	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
15	Program Pengembangan Penamahan	3.8	AUDIT KETAATAN	45 HP
16	Program pendidikan anak usis dini	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
17	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	3.7	AUDIT KETAATAN	45 HP
18	Seivretariat Deerah	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
19	Selvetarial OPRO	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
20	Dinas Pendidikan dan Kebudaysan	4.3	FASILITASI PENERAPAN MR	15 HP
21	Desa AA	2.3	AUDIT KETAATAN	15 HP
22	Dess AB	3.2	AUDIT KETAATAN	15 HP
23	Desa AC	3.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
24	Desa AD	2.1	AUDIT KETAATAN	15 HP
25	Desa AE	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
	Desa AF	3.0	AUDIT KETAATAN	15 HP
27	Deta AG	2.9	AUDIT KETAATAN	15 HP

## Peturjuk Pengision

- (1) Disi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas (3) Diisi dengan jumlah bobot risiko berdasarkan hasil penyusunan
- (4) Diisi dengan rencana jenis pengawasan yang akan dilakukan (5) Diisi dengan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melakukan

## Daftar Area Pengawasan yang Wajib Dimasukkan dalam PKPT (Mandatory)

No	Nama Area Pengawasan	Alasan Wajib	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Reviu RKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan
2	Reviu RKA oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
3	Reviu LKPD oleh APIP	Amanat peraturan	Permendagri No. 4 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
4	Reviu PBJ oleh APIP	Amanat peraturan	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
5	Reviu DAK	Amanat peraturan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Amanat peraturan	Permendagri No 25 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021
7	Audit Ketaatan pada Badan PTSP	Permintaan KDH	Nota Dinas KDH Nomor
8	PDTT pengelolaan dana desa pada Desa EFG	Permintaan APH	MoU nomor Surat Permintaan nomor
9	Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Amanat peraturan	Permendagri nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
10	Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Pemerintah	Amanat peraturan	Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan wajib dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang wajib dimasukkan dalam PKPT

Lampiran Pedoman Nomor 13 Contoh Daftar Area Pengawasan Yang Tidak Masuk PKPT

# Auditable Unit yang Tidak Masuk dalam PKPT

No	Nama OPD/Program/Keglatan	Alasan Tidak Masuk Perencanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1001	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alkes (DAK)	Akan diaudit oleh Itjend Kemenkes	Surat Itjend Kemenkes Nomor
0577	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Akan diaudit oleh BPKP	Surat Kepala Perwakilan BPKP Nomor
3	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Akan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi/Kemendagri	Permendagri Nomor
	Program Strategis Nasional	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
5	Program Belanja Luar Negri	Akan diaudit oleh BPKP	Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

## Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan Prioritas
- (3) Diisi dengan alasan area pengawasan tidak dimasukkan dalam PKPT
- (4) Diisi dengan keterangan atau dasar hukum/kebijakan atas pengawasan yang tidak dimasukkan dalam PKPT

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

NOMOR : 123/INSPDA/01/202X TANGGAL : 31 DESEMBER 202X

TENTANG : PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RESIKO TAHUN 202X+1

No	Area Pengawasan	Jenis Pengowasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jackspl		HP					44.000.000	Jumlah	Sarana dan	Tingkat	22.00
					RMP	RPL	PJ	THE .	KT	AT	Jumish	Anggaran	Laporan	Prasarana	Risiko	Keterangan
(7)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	9			(7			(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Audit Kinerja	Menilai 3E atas Program Wajib Belojar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan	Mg-II Jan 2020	Mg-IV Jan 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop. ATK	Teggi	
2	Reviu LKPD sieh APIP	Reviu	Menilai Kesesuaian UKPD ferhadap SAP dan Peraturan Lain	SPKAD	Mg-II Mar 2020	Mg-IV Mar 2020	2	5	10	10	27	20,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Tinggi	
3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Monitoring	Menitai Kepatuhan terhadap Peraturan	Seluruh OPD	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	3	7	7	18	15,000,000.00	11119	Laptop, ATK	Tinggi	
4	Program Peningkalan Pelayanan Publik Bidang Perizinan	Audit Ketastan	Menitai Kepatuhan terhadap Peraturan	Badan PTSP	Mg-II Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	2	5	10	10	27	29,000,000.00	1 LHP	Laptop, ATK	Sedang	Permintaan KDH
5	Program Pengembangan Pemasaran Parlwisata	Fasilitasi Penerapan Manajemen Risika	Meningkatkan pengelolaan risiko program	Dinas Pariwisata	Mg-IV Juli 2020	Mg-IV Juli 2020	1	1	5	5	12	5,000,000.00	1149	Laptop, ATK	Tinggi	
6																

#### PETUNJUK PENGISIAN

- (3) Diisi dengan nomor urut area pengawasan
- (2) Diisi dengan nama Area Pengawasan
- (3) Dilsi dengan jenis pengawasan yang akan dilakukan
- (4) Diisi dengan tujuan/sasaran atas jenis pengawasan yang akan ditakukan
- (5) Diisi dengan ruang lingkup pengawasan
- (6) Diisi dengan jadwal rencana akan ditakukan pengawasan (Rencana Mulai Penugasan dan Rencana Penerbitan Laporan)
- (7) Diisi dengan anggaran waktu pelaksanaan pengawasan untuk setiap jenjang jabatan
- (8) Diisi dengan anggaran dana pelaksanaan pengawasan
- (9) Diisi dengan jumlah rencana output laporan atas hasit pengawasan
- (10) Dilsi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan
- (II) Diisi dengan tingkat risiko area pengawasan
- (12) Diisi dengan keterangan lain bila dibutuhkan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR